

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL
DENGAN LUAS WILAYAH SEBAGAI VARIABEL MODERATING
PADA PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2016**

Wasis Sugotro¹⁾, Patricia Dhiana Paramita²⁾, Agus Suprijanto³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang
^{2), 3)} Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

ABSTRACT

This reserch aims to examine the effect of local taxes, regional retributions, general allocation funds, special allocation funds for the allocation of capital expenditures with an area as a moderating variable, For regional income from the four variables on capital expenditure allocation. Capital spending has an important role in running the government system which is to improve welfare public and good governance.

The population used in this study is the Semarang city financial report from 2011 – 2016, the sample in this study is the population because of the available of data, while the data analysis technique used is regresi linear berganda and for moderating variable analysis using absolute difference value test.

The analysis result of the study show that taxes, levies, general allocation funds, special allocation funds are very influential on the allocation of capital expenditure which can be seen in stage I. While in stage II shows that the area does not have a significant effect on the relationship between local taxes, regional retribution, general allocation funds and special allocation funds with capital expenditure. And indicates that the area cannot moderate the regional income from regional taxes, regional retributions, general allocation funds, special allocation fund for capital expenditure.

Researcher's advice should be that regional revenue use such as local taxes, regional retribution, general allocation funds and special allocation funds are better allocated to other budgeted uses because based on the results of the research it turns out that regional income has a significant effect on capital expenditure.

Keywords : local taxes, regional retribution, general allocation funds, special allocation funds, area, capital expenditure

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang kini telah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Dengan otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membiayai seluruh belanja-belanja daerah berdasarkan azas kepatuhan, kebutuhan dan juga kemampuan daerah seperti yang tercantum dalam anggaran daerah. Pemerintah daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktifitasnya yang dianggarkan dalam APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Sulistiyowati 2011:2). Sumber dana bagi Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan (DAH, DAU, dan DAK) dan pinjaman Daerah.

TELAAH PUSTAKA

Definisi PAJAK DAERAH

Menurut (Hasbiullah, 2015:139) pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. . Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung

jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Diana dan Lilis, 2010:1).

DEFINISI RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam (UU No. 28 Tahun 2009) disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Definisi DANA ALOKASI UMUM

Menurut (Nodiawan dan Ayuningtyas, 2010:26) DAU adalah dana yang bertujuan bagi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerimaan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan

potensi daerah. Dalam Wandira, 2013:30) ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat di gali oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah untuk menanggulangi ketimpangan tersebut.

Definisi Dana Alokasi Khusus

Menurut (Nordriawan dan ayuningtyas, 2010:26) DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standart tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Definisi Belanja Modal

Menurut PP No 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja modal

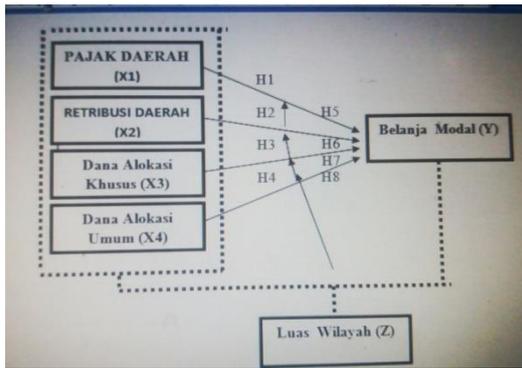
merupakan salah satu komponen belanja langsung digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Menurut (Sianturi, 2010) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Definisi . Luas Wilayah

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas wilayah pemerintah merupakan jumlah ukuran dari besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, kota maupun provinsi. Luas wilayah sangat erat kaitannya dengan geografis suatu daerah (Yusin, 2015).

Model Penelitian

Gambar 2.1 **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating**



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:115). Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah kota Semarang.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan kota Semarang dari tahun 2011-2016.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan pihak lain (Kuncoro, 2013:148). Data sekunder ini berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintahan Kota Semarang dari tahun 2011-2015 mengenai jumlah anggaran pajak daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK dan Luas Wilayah yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) kota Semarang.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu menumpulkan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengumpulkan data sekunder baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114), dengan mengumpulkan data-data dari laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota sejak tahun 2011-2016.

HASIL DAN ANALISIS

Uji Deskriptif

Peneliti melakukan Analisis Deskriptif terhadap variabel Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3), Dana Alokasi Khusus (X4), Luas Wilayah (X5) dan variabel Belanja Modal (Y). Analisis ini dapat diuji dengan menggunakan statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-

rata (*mean*), *maximum*, *minimum*, dan standar deviasi. Hasil dari analisis deskriptif dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	6	360084128238	1006487472776	709253008847,50	219822576398,288
X2	6	84487321935	123215026523	99030834916,17	15853511321,721
X3	6	715700805000	121170820400	1024977435166,67	176559355757,590
X4	6	14993022000	246886746970	76408380661,67	85727783077,467
X5	6	373699189	373699511	373699397,83	118,376
Y	6	305708572973	1026716904816	633601937549,33	275521801106,447
Valid N (listwise)	6				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan diketahui:

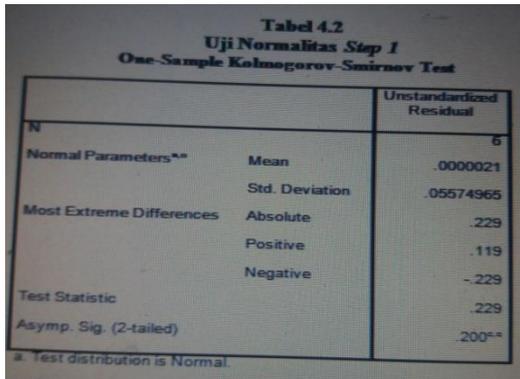
1. Variabel Pajak Daerah (X1) mempunyai nilai minimum sebesar 360084128238, nilai maximum sebesar 1006487472776, sedangkan nilai mean sebesar 709253008847,50 dan nilai standar deviasi sebesar 219822576398,288.
2. Variabel Retribusi Daerah (X2) mempunyai nilai minimum sebesar 84487321935, nilai maximum sebesar 123215026523, sedangkan nilai mean sebesar 99030834916,17 dan nilai standar deviasi sebesar 15853511321,721.

3. Variabel Dana Alokasi Umum (X3) mempunyai nilai minimum sebesar 715700805000, nilai maximum sebesar 1211708204000, sedangkan nilai mean sebesar 1024977435166,67 dan nilai standar deviasi sebesar 176559355757,590.
4. Variabel Dana Alokasi Khusus (X4) mempunyai nilai minimum sebesar 14993022000, nilai maximum sebesar 246886746970, sedangkan nilai mean sebesar 76408380661,67 dan nilai standar deviasi sebesar 85727783077,467.
5. Variabel Luas Wilayah (X5) mempunyai nilai minimum sebesar 373699189, nilai maximum sebesar 373699511, sedangkan nilai mean sebesar 373699397,83 dan nilai standar deviasi sebesar 118,376.
6. Variabel Belanja Modal (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 305708572973, nilai maximum sebesar 1026716904816, sedangkan nilai mean sebesar 633601937549,33 dan nilai standar deviasi sebesar 275521801106,447.

Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji ini menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov. (Ghozali, 2011). Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov. Adapun hasil dari uji normalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Uji Normalitas Tahap I



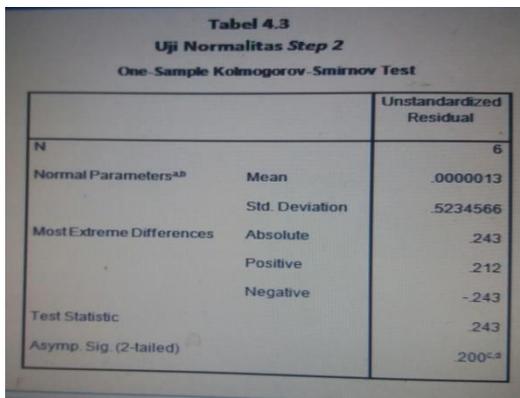
		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000021
	Std. Deviation	.05574965
Most Extreme Differences	Absolute	.229
	Positive	.119
	Negative	-.229
Test Statistic		.229
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200**

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas step 1 yang ditujukan untuk mengetahui normalitas dari masing-masing variabel, menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian terdistribusi normal.

Tabel 4. 3
Uji Normalitas Tahap II



		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000013
	Std. Deviation	.5234566
Most Extreme Differences	Absolute	.243
	Positive	.212
	Negative	-.243
Test Statistic		.243
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200**

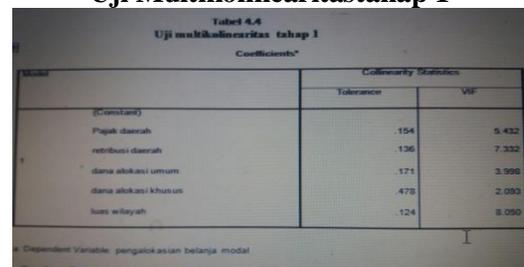
Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji statistik kolmogorov smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi p sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal.

Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (Independen). Hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan menggunakan SPSS ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Uji Multikolinearitas tahap 1



Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak daerah	.154	6.432
retribusi daerah	.136	7.332
dana alokasi umum	.171	5.908
dana alokasi khusus	.470	2.093
luas wilayah	.124	8.050

a. Dependent Variable: pengalokasian belanja modal

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.4, maka dapat dilihat bahwa nilai VIF semua variabel bebas jauh di bawah 10 dan hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan ada variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel bebas.

Tabel 4.5
Uji Multikolinearitas Tahap 2

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak daerah	.104	4.121
retribusi daerah	.613	6.012
dana alokasi umum	.254	4.718
dana alokasi khusus	.175	3.104
luas wilayah	.116	7.141
moderate1	.362	7.154
moderate2	.213	2.678
moderate3	.515	4.237
moderate4	.712	6.828

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5, maka dapat dilihat bahwa nilai VIF semua variabel bebas jauh di bawah 10 dan hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan ada variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Akan tetapi jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi

heteroskedastisitas (Priyatno, 2012:158). Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji *Glejser*, yang mana jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas Tahap 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.915	.342		.156	.432
Pajak daerah	.817	.692	1.432	1.181	.447
retribusi daerah	-.554	.353	-1.103	-1.571	.361
dana alokasi umum	.100	.403	.242	.249	.845
dana alokasi khusus	.023	.031	.274	.729	.539
luas wilayah	-.031	.097	-.235	-.319	.803

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.6, maka dapat diketahui bahwa variabel penelitian, yaitu Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), DAU (X_3), DAK (X_4), Belanja Modal (Y) dan Luas Wilayah (Z) tidak terjadi heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikan di atas 0,05

Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas Tahap II

Tabel 4.7
Uji Glejser Step 2 dengan MRA
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.63	.543		.432	.523
	pajak daerah	1.824	.526	.256	.231	.614
	retribusi daerah	1.605	.075	.250	.454	.542
	dana alokasi umum	.524	.143	2.715	1.423	.132
	dana alokasi khusus	1.243	.533	.254	.125	.234
	luas wilayah	-1.440	.342	-.850	.712	.965
	moderatex1	.781	.875	1.076	.124	.543
	moderatex2	.867	.521	.667	.321	.125
	moderatex3	1.542	.524	.554	1.423	.765
	moderatex4	-2.063	.312	-.145	.542	.617

a. Dependent Variable: abares2

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.7, maka dapat diketahui bahwa variabel penelitian, yaitu Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), DAU (X_3), DAK (X_4), Belanja Modal (Y) dan Luas Wilayah (Z) tidak terjadi heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikan diatas 0,05.

Analisis Regresi Linier 2 Tahap

Analisis regresi linier 2 tahap adalah analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis dalam penelitian ini memiliki 2 tahap atau *Two Stage Least Square (2SLS)*.

Tabel 4.8
Uji Regression Tahap I

Tabel 4.10
Uji Regression step 1
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.432	3.345		.654	.543
	Pajak daerah	-3.082	4.355	.432	-.708	.608
	retribusi daerah	1.811	2.220	.594	.816	.564
	dana alokasi umum	.803	2.536	.318	.317	.805
	dana alokasi khusus	-.042	.197	-.084	-.215	.865
	luas wilayah	-.222	.614	-.276	-.362	.779

a. Dependent Variable: pengalokasian belanja modal

Sumber : Data diolah, 2018

Dari tabel 4.10 pada tabel *Standardized Coefficients* dapat dirumuskan persamaan regresi seperti berikut :

$$Y = 2,432 + 0,432 X_1 + 0,594 X_2 + 0,318 + (-0,084) - 0,276 Z$$

Tabel 4.9
Uji Regression Tahap II

Tabel 4.11
Uji Regression Step 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.581	5.313		.564	.308
	pajak daerah	2.546	1.021	1.130	-.870	.413
	retribusi daerah	2.477	.926	.942	.165	.496
	dana alokasi umum	.075	.065	.182	.131	.898
	dana alokasi khusus	1.764	-.572	-.408	-.112	.512
	luas wilayah	3.765	-.421	-.672	.014	.909
	moderatex1	-.785	1.782	.921	.254	1.105
	moderatex2	.543	3.725	1.005	.743	.385
	moderatex3	.326	.973	.732	1.870	.062
	moderatex4	.156	.270	.123	.912	.512

a. Dependent Variable: pengalokasian belanja modal

Sumber : Data diolah, 2018

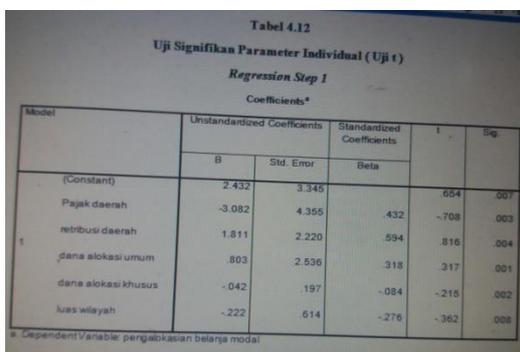
Dari tabel 4.11 pada tabel *Standardized Coefficients* dapat dirumuskan persamaan regresi seperti berikut :

$$Y = 1,581 - 1,130 X_1 - 0,942 X_2 + 0,182 X_3 + 0,408 X_4 + (-0,672) Z + 0,921 X_1 * Z - 1,005 X_2 * Z - 0,732 X_3 * Z - 0,123 X_4 * Z$$

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2012: 98). Didalam penelitian ini variabel independennya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK sedangkan variabel dependennya adalah Belanja Modal. Adapun hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) Step 1



Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2.432	3.345		.654	.007
Pajak daerah	-3.082	4.355	.432	-.708	.003
retribusi daerah	1.811	2.220	.594	.816	.004
dana alokasi umum	.803	2.536	.318	.317	.001
dana alokasi khusus	-.042	.197	-.084	-.215	.002
luas wilayah	-.222	.614	-.278	-.362	.008

Sumber : Data diolah, 2018

Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Variabel Pajak Daerah (X_1) mempunyai t hitung sebesar **-0,708** dan nilainya kurang dari t tabel yaitu **2,13185**. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Pajak Daerah (X_1) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintahan Kota Semarang. Selain itu, nilai signifikan Pajak Daerah (X_1) sebesar **0,03** dan nilainya

kurang dari 0,05. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Pajak Daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Dalam penelitian tersebut, t hitung bertanda negatif. Pernyataan tersebut bermakna bahwa jika terjadi peningkatan Pajak Daerah di Kota Semarang maka Belanja Daerah mengalami penurunan. Pajak Daerah memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar **-0,708**.

Kesimpulannya adalah Hipotesis Pertama (H_1) yang menyatakan berpengaruh negatif antara Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Semarang tahun 2011 – 2016 **diterima**

Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Variabel Retribusi Daerah (X_2) mempunyai t hitung sebesar **0,816** dan nilainya lebih dari t tabel yaitu **2,13185**. Sehingga dapat diketahui bahwa Retribusi Daerah (X_2) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintahan Kota Semarang. Selain itu, nilai signifikan (X_2) sebesar **0,004** dan nilainya kurang dari 0,05. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Retribusi Daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Dalam penelitian tersebut, t hitung bertanda positif. Pernyataan tersebut bermakna bahwa jika terjadi peningkatan Retribusi Daerah pada Pemerintahan Kota Semarang maka nilai Belanja Modal mengalami kenaikan juga secara signifikan.

Retribusi Daerah memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan sebesar **0,816**

Kesimpulannya adalah Hipotesis Kedua (H_2) yang menyatakan ada pengaruh positif antara Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Semarang tahun 2011 – 2016 **diterima**.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Variabel Dana Alokasi umum (X_3) mempunyai t hitung sebesar **0,317** dan nilainya kurang dari t tabel yaitu **2,13185**. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (X_3) berpengaruh terhadap Belanja modal (Y) pada Pemerintahan Kota Semarang. Selain itu, nilai signifikan Dana Alokasi Umum(X_3) sebesar **0,001** dan nilainya kurang dari 0,05. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Umum (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Dalam penelitian tersebut, t hitung bertanda positif. Pernyataan tersebut bermakna bahwa jika terjadi peningkatan Dana Alokasi Umum di Kota Semarang maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan secara signifikan. Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar **0,001**.

Kesimpulannya adalah Hipotesis Ketiga (H_3) yang menyatakan ada pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Semarang tahun 2012 – 2016 **diterima**.

Pengujian Hipotesis Keempat (H_4)

Variabel Dana Alokasi Khusus (X_4) mempunyai t hitung sebesar **-0,215** dan nilainya kurang dari t tabel yaitu **2,13185**. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (X_4) berpengaruh terhadap Belanja modal (Y) pada Pemerintahan Kota Semarang. Selain itu, nilai signifikan Dana Alokasi Khusus(X_4) sebesar **0,002** dan nilainya kurang dari 0,05. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_4) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Dalam penelitian tersebut, t hitung bertanda negatif. Pernyataan tersebut bermakna bahwa jika terjadi peningkatan Dana Alokasi Khusus di Kota Semarang maka Belanja Modal akan mengalami Penurunan secara tidak signifikan. Dana Alokasi Khusus memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar **0,002**.

Kesimpulannya adalah Hipotesis Keempat (H_4) yang menyatakan ada pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Semarang tahun 2012 – 2016 **ditolak**

Tabel 4.11

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) Step 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.581	5.313		.564	.588
pajak daerah	2.946	1.021	1.130	-.870	.413
retribusi daerah	2.477	.926	.942	165	.456
dana alokasi umum	.075	.065	.182	131	.058
dana alokasi khusus	1.764	-.572	.408	-.112	.912
luas wilayah	3.765	-.421	-.672	.014	.909
moderate1	-.785	1.782	.921	.254	1.105
moderate2	.543	3.725	1.005	.743	.365
moderate3	.326	.973	.732	1.870	.082
moderate4	-.156	.270	.123	.312	.512

Sumber : Data diolah, 2018

Pengujian Hipotesis KeLima (H₅)

Dari tabel 4.11, dapat diketahui bahwa dari kelima variabel yang dimasukkan dalam model regresi, ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel Luas Wilayah (Z) memberikan nilai t sebesar **0,014**>t tabel sebesar **2,13185** dengan tingkat signifikansi $0,909 < 0,05$. Sedangkan variabel moderasi pajak daerah yang memiliki nilai t hitung sebesar **0,254**>**2,13185** dan signifikan karena nilai sig, **1,105**< **0,05**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Moderasi Luas Wilayah yang diproksikan oleh Belanja modal tidak layak untuk menjadi variabel moderasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa Luas Wilayah memoderasi hubungan antara Pajak Daerah terhadap Belanja Modal. Maka hipotesis kelima **ditolak**.

Pengujian Hipotesis Keenam (H₆)

Dari tabel 4.11, dapat diketahui bahwa dari kelima variabel yang dimasukkan dalam model regresi, ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel Luas Wilayah (Z) memberikan nilai t sebesar **0,014**>t tabel sebesar **2,13185** dengan tingkat signifikansi $0,909 < 0,05$. Sedangkan variabel moderasi Retribusi Daerah yang memiliki nilai t hitung sebesar **0,743**>**2,13185** dan signifikan karena nilai sig, **0,865**< **0,05**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Moderasi Luas Wilayah yang diproksikan oleh Belanja Modal tidak layak untuk menjadi variabel moderasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa Luas Wilayah memoderasi hubungan antara Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal. Maka hipotesis keenam **ditolak**.

Pengujian Hipotesis Ketujuh (H₇)

Dari tabel 4.11, dapat diketahui bahwa dari kelima variabel yang dimasukkan dalam model regresi, ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel Luas Wilayah (Z) memberikan nilai t sebesar **0,014**>t tabel sebesar **2,13185** dengan tingkat signifikansi $0,909 < 0,05$. Sedangkan variabel moderasi Dana Alokasi umum yang memiliki nilai t hitung sebesar **1,870**>**2,13185** dan

signifikan karena nilai sig, $0,882 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Moderasi Luas Wilayah yang diproksikan oleh Belanja Modal tidak layak untuk menjadi variabel moderasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa Luas Wilayah memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Maka hipotesis ketujuh **ditolak**.

Pengujian Hipotesis Kedelapan (H_8)

Dari tabel 4.13, dapat diketahui bahwa dari kelima variabel yang dimasukkan dalam model regresi, ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel Luas Wilayah (Z) memberikan nilai t sebesar $0,014 > t$ tabel sebesar $2,13185$ dengan tingkat signifikansi $0,909 < 0,05$. Sedangkan variabel moderasi Dana Alokasi Khusus yang memiliki nilai t hitung sebesar $0,912 > 2,13185$ dan signifikan karena nilai sig, $-0,512 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Moderasi Luas Wilayah yang diproksikan oleh Belanja Modal tidak layak untuk menjadi variabel moderasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa Luas Wilayah memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Maka hipotesis kedelapan **ditolak**.

Koefisien Determinasi (*R Square*)

Menurut Ghazali (2011:97) koefisien determinasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Adapun hasil pengujian Koefisien Determinasi (*R Square*) pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan 4.13 berikut ini :

Tabel 4.12

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Regression step 1
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.963 ^a	.928	.639	12466	2.238

Sumber : Data diolah, 2018

Adjusted R^2 regression step 1 sebesar 0,639 yang artinya variasi variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK sebesar 0,639 atau 63,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 36,1 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Dan dapat dikatakan bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU , DAK dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 63,9%.

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.573 ^a	.584	.576	10357	1.947

Sumber : Data diolah, 2018

Besarnya Adjusted R² Regression step 2 adalah 0,576 yang artinya variasi variabel Luas Wilayah (Z) dapat diterangkan oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, Belanja Modal sebesar 0,576 atau 57,6 persen, sedangkan sisanya 42,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model persamaan regresi. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan variabel moderasi akan dapat memperkuat atau meningkatkan pengaruh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap variabel Belanja Modal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan oleh hasil uji parsial dimana nilai t hitung X1 sebesar -0,708 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,13185

dan nilai signifikansi sebesar 0,03 yang lebih kecil dari 0,05.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan oleh hasil uji parsial dimana nilai t hitung X2 sebesar 0,816 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,13185 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan oleh hasil uji parsial dimana nilai t hitung X3 sebesar 0,317 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,13185 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan oleh hasil uji parsial dimana nilai t hitung X4 sebesar -0,215 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,13185 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05.
5. Luas Wilayah tidak dapat memoderasi pengaruh Pajak daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji t dimana nilai moderateX1 sebesar 0,254 yang lebih kecil dari F tabel sebesar 2,13185 dan nilai signifikansi sebesar 1,105 yang lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05 .

6. Luas Wilayah tidak dapat memoderasi pengaruh Retribusi daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji t dimana nilai t_{hitung} sebesar 0,743 yang lebih kecil dari F_{tabel} sebesar 2,13185 dan nilai signifikansi sebesar 0,865 yang lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 .
7. Luas Wilayah tidak dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji t dimana nilai t_{hitung} sebesar 1,870 yang lebih kecil dari F_{tabel} sebesar 2,13185 dan nilai signifikansi sebesar 0,882 yang lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 .
8. Luas Wilayah tidak dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji t dimana nilai t_{hitung} sebesar 0,912 yang lebih kecil dari F_{tabel} sebesar 2,13185 dan nilai signifikansi sebesar 0,512 yang lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 .

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan keterbatasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menguji data keuangan Pemerintah Kota Semarang dari tahun 2011 – 2016 sehingga hasil penelitian ini hanya terbatas penerapannya kepada satu objek yaitu Pemerintah Kota Semarang dan tidak dapat digunakan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang telah didapat maka saran penelitian yang dapat diterapkan adalah:

1. Penggunaan pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus lebih baik dialokasikan ke penggunaan anggaran yang lainnya dikarenakan berdasarkan hasil penelitian ternyata pendapatan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
2. Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian dengan meningkatkan jumlah data, membuka peluang hubungan penelitian dengan variabel lain, dan memberikan solusi atas hasil penelitian yang telah didapat.

3. Eksekutif sebagai agen dengan legislatif sebagai prinsipal seharusnya bekerjasama dengan baik untuk kepentingan rakyat, tanpa mementingkan kebutuhan masing-masing. Legislatif seharusnya terjun langsung ke masyarakat dan melihat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakat untuk perencanaan pengalokasian anggaran yang mengarah kesejahteraan masyarakat seperti pengalokasian terhadap Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbincan, Okto. 2012. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Apbd Di Pemerintahan Kota Di Sumatera Utara. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan.*
- Arwati, Dini dan Novita Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan. ISBN: 979-26-0266-6, Semarang.*
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. Perpajaka Indonesia Edisi 3. *Yogyakarta. Andi.*
- Ghozali, Imam. 2013, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21 Cetakan VII. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang*
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. Akuntansi keuangan daerah Edisi 4. *Yogyakarta. Salemba Empat*
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2, Nomor 1, Hal.: 53-64.*
- Handayani, Dwi dan Elva Nuraina. 2012. Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Madiun.*
- Hasbiullah. 2015. Ekonomi publik suatu perbandingan konsep ekonomi islam dengan teori konvensional. *Makassar. Alauddin University Press.*
- Irawan. 2011. Central Government's Roles in New Autonomous Region Development in Bandung Barat. *International Journal of Administrative Science & Organization, 18(2), pp: 122-131.*
- Jaya, Putu dan Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):79-92. ISSN: 2302-8556.*
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. Metode Riset Untuk bisnis dan ekonomi. *Jakarta: Erlangga*

- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Mamonto, J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. 2014. Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi daerah Terhadap belanja modal. *Jurnal ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Nordiawan, Deddi dan Ayunigtiayas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. *Jakarta. Salemba Empat*.
- Nugroho, Fajar. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, Semarang*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Puspitasari, Ni Luh. Made Pradana dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2015. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Volume 3 No. 1*.
- Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013. Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening. *Skripsi, Publikasi, Universitas Negeri Semarang*.
- Reyowijoyo, Muindro. 2010. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. *Jakarta. Mitra Wcana Media*.